

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang : 2009-2010  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : Dewan Kesehatan Rakyat se-Jabodetabek  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Rabu, 28 Oktober 2009  
Pukul : 11.30 WIB – selesai  
Acara : Audiensi  
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR-RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Anggota : 11 orang anggota dari 46 Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat dibuka pukul 11.45 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Tata Tertib DPR RI pasal 245 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

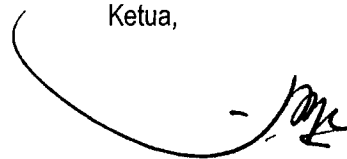
**II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN**

1. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) se- Jabodetabek mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI, antara lain :
  - a. Menolak rencana Menteri Kesehatan RI membuka kembali lembaga penelitian kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat di bidang Biomedis dalam bentuk dan nama apa pun juga.
  - b. Melanjutkan program Jamkesmas.
  - c. Memudahkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dengan mempermudah birokrasi rumah sakit yang sangat menyulitkan.
  - d. Mengurangi pencaloan di rumah sakit.

2. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) se-Jabodetabek menyampaikan pernyataan sebagai berikut :
  - a. Demi menjaga kedaulatan bangsa dan Negara, sesuai dengan UUD 45. Seluruh rakyat mewaspadaikan semua pengambilan darah tanpa ada surat resmi yang bertanggung jawab dari pemerintah dan instansi kesehatan setempat. Setiap orang harus terlibat menjaga keselamatan rakyat dari pencurian sampel specimen darah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
  - b. Aparat Kepolisian segera memeriksa semua aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan sampel darah rakyat Indonesia yang dilakukan secara ilegal yaitu tanpa ijin, dan tidak memberitahukan hasilnya kepada instansi terkait.
  - c. Meminta agar Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono meninjau ulang terhadap keputusan Menkes RI Endang Rahayu Sedyaningsih yang akan meneruskan kerjasama dengan bangsa asing di bidang penelitian, mengingat bangsa ini demikian lemah ketika harus berhadapan dengan kepentingan asing. Hal ini demi menjalankan amanat UUD 45 "menjamin keamanan dan keselamatan hidup rakyat".
  - d. Meminta agar DPR RI bersatu tidak membiarkan rakyat dalam keadaan bahaya kesehatan, dimana seringkali rakyat dijadikan kelinci percobaan dengan dalih penelitian.
3. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) se-Jabodetabek menyampaikan program kerja, antara lain :
  - a. ikut mendorong terbentuk dan berfungsinya desa siaga;
  - b. melakukan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana;
  - c. membantu mengkoordinasikan bantuan bagi desa siaga dalam menghadapi krisis kesehatan akibat bencana, penyakit menular, dan gizi buruk;
  - d. melakukan advokasi bagi masyarakat miskin yang memerlukan pelayanan kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI dapat memahami aspirasi yang disampaikan oleh DKR se-Jabodetabek dan aspirasi tersebut akan menjadi bahan masukan saat Komisi IX DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.

Jakarta, 28 Oktober 2009  
Pimpinan Komisi IX DPR RI  
Ketua,



**dr. RIBKA TJIPTANING**